

Receive : 06 May 2026
Revised : 18 May 2026
Accepted : 08 June 2026

Jurnal ADMINISTRATOR

P-ISSN : 1858-084X

E-ISSN : 2808-5213

DOI : 10.55100/administrator.v8i1.119

Vol. 8 No. 1 June 2026, Hlm. 48-61



Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Melalui Forum Adat Berdasarkan Perspektif Masyarakat Dusun 5 Desa Bale Kecamatan Tanantovea Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah

***Mustainah, Intam Kurnia, Dandan Haryono, Nurul Salsabila Alli, Tasya Alisya Maharani, Andi Rindi Ramadhani, Wila Warni, Aura Aqila Muthiah, Hesta Alfarisi**

Email : mustainahmappatoba@gmail.com*

¹Program Studi Administrasi Publik, Universitas Tadulako

ABSTRACT

Effective village development requires the active involvement of the community as the primary subject of development. This study aims to identify and describe community participation in village development through customary forums in Hamlet 5 of Bale Village, Tanantovea District, Donggala Regency, Central Sulawesi. The conceptual framework adopted refers to the four dimensions of community participation as proposed by Cohen and Uphoff, namely: decision-making, implementation, benefit utilization, and evaluation. This study employed a descriptive method with a qualitative approach. Data were collected through observation, documentation, and in-depth interviews with informants selected using purposive sampling, including village government officials, customary leaders, hamlet heads, and local residents. Data validity was tested using source triangulation, while data analysis followed the Miles and Huberman model. The findings reveal that the community of Hamlet 5, Bale Village, has participated across all four dimensions of development, although the level of effectiveness varies. In the decision-making dimension, the customary forum held at the Baruga (traditional community hall) serves as the primary venue for conveying community aspirations such as proposals for road infrastructure and candlenut shelling equipment although community attendance has not been fully optimal due to personal commitments. In the implementation dimension, community participation is strongly manifested through the culture of gotong royong (voluntary collective labor), particularly in the physical construction of roads and bridges, as well as the management of candlenut plantations, both of which are supported by the village government and security personnel. In the benefit utilization dimension, the infrastructure that has been built has had a positive impact on the economic mobility of candlenut farmers, although its benefits remain unevenly distributed due to the persisting poor condition of certain road sections. Finally, in the evaluation dimension,

Page | 48

Jurnal Administrator : Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial

Vol. 8 No. 1, June 2026

Receive : 06 May 2026
Revised : 18 May 2026
Accepted : 08 June 2026

Jurnal ADMINISTRATOR

P-ISSN : 1858-084X

E-ISSN : 2808-5213

DOI : 10.55100/administrator.v8i1.119

Vol. 8 No. 1 June 2026, Hlm. 48-61



oversight continues to operate in an informal, familial manner through social communication among village government officials, customary leaders, and the wider community. This study concludes that customary forums play a strategic role in bridging participatory development communication at the village level

Keywords: Participation; Community; Development; Customary Forum

LATAR BELAKANG

Pembangunan desa merupakan bagian penting dalam proses pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan, serta kualitas hidup masyarakat desa (Badan Pusat Statistik, 2023). Pembangunan desa tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik semata, tetapi juga mencakup pembangunan sosial, ekonomi, budaya, dan pemberdayaan masyarakat (Soetomo, 2022). Dalam pelaksanaan pembangunan desa, partisipasi masyarakat menjadi salah satu unsur utama yang menentukan keberhasilan pembangunan. Masyarakat tidak lagi diposisikan hanya sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek yang memiliki hak dan tanggung jawab untuk terlibat dalam setiap proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan desa (Drew & Adisasmita, 2021).

Secara teoritik, partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pembangunan yang menyangkut kepentingan bersama. Menurut Cohen dan Uphoff, partisipasi masyarakat dapat dilihat dari keterlibatan masyarakat dalam tahap pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, pemanfaatan hasil pembangunan, dan

evaluasi pembangunan (Azkia et al., 2026). Selain itu, Mikkelsen menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat merupakan proses aktif masyarakat dalam mempengaruhi arah dan pelaksanaan pembangunan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat itu sendiri (Suyono, Aunullah, & Sa'diyah, 2026). Dengan adanya partisipasi masyarakat, pembangunan akan lebih efektif karena masyarakat memahami kebutuhan dan kondisi lingkungan mereka secara langsung (Apriyani & Arif, 2020).

Selain pendekatan teoritik, partisipasi masyarakat dalam pembangunan juga memiliki dasar regulasi yang kuat di Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa pembangunan desa dilaksanakan dengan semangat kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong royong guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Dalam Pasal 78 dijelaskan bahwa pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Selanjutnya, dalam Pasal 80 dijelaskan bahwa perencanaan

pembangunan desa harus melibatkan masyarakat desa melalui musyawarah desa (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa). Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memiliki peran penting dalam menentukan arah pembangunan desa.

Selain itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa juga menegaskan bahwa pembangunan desa dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat desa sebagai unsur utama dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Dalam regulasi tersebut dijelaskan bahwa masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi, kebutuhan, serta usulan pembangunan melalui musyawarah desa. Dengan demikian, keterlibatan masyarakat bukan hanya menjadi pelengkap dalam pembangunan desa, tetapi merupakan bagian yang harus ada dalam proses pembangunan itu sendiri (Luxton et al., 2026).

Secara empirik, partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dapat dilihat melalui keterlibatan masyarakat dalam kegiatan musyawarah, gotong royong, penyampaian aspirasi, serta pengawasan terhadap pembangunan desa. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pembangunan desa yang melibatkan masyarakat secara aktif cenderung lebih

efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat (Juliana & Priyanti, 2023; Sante et al., 2023). Keberhasilan pembangunan juga dipengaruhi oleh adanya hubungan komunikasi yang baik antara pemerintah desa, lembaga adat, dan masyarakat (Sembel et al., 2017). Dalam masyarakat pedesaan, forum adat sering kali menjadi sarana penting dalam membangun komunikasi sosial dan menyatukan aspirasi masyarakat dalam proses pembangunan (Larisu & Jopang, 2022).

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu unsur penting dalam pelaksanaan pembangunan, khususnya pembangunan desa (Drew & Adisasmita, 2021). Partisipasi masyarakat diartikan sebagai keterlibatan masyarakat secara aktif dalam setiap proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi pembangunan. Keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan sangat diperlukan agar program pembangunan yang dijalankan dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh (Munawaroh & Khotimah, 2025). Dalam pembangunan desa, masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai objek pembangunan, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi, memberikan ide, tenaga, maupun kontribusi lainnya demi tercapainya

tujuan pembangunan (Luxton et al., 2026)

Menurut Mikkelsen, partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan masyarakat secara sukarela dalam perubahan yang ditentukan sendiri oleh masyarakat (Suyono et al., 2026). Partisipasi masyarakat mencerminkan adanya kesadaran masyarakat untuk ikut bertanggung jawab terhadap keberhasilan pembangunan di lingkungannya. Sementara itu, (Drew & Adisasmita, 2021) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat adalah keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, baik dalam bentuk perencanaan, pelaksanaan, maupun pemanfaatan hasil pembangunan. Dengan adanya partisipasi masyarakat, pembangunan akan lebih efektif karena masyarakat mengetahui secara langsung kebutuhan dan permasalahan yang terjadi di lingkungan mereka (Petersen et al., 2026).

Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori dimensi partisipasi masyarakat menurut Cohen dan Uphoff. Cohen dan Uphoff menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan terdiri dari beberapa dimensi yang saling berkaitan. Menurut Cohen dan Uphoff, partisipasi masyarakat dapat dilihat melalui empat dimensi utama, yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam

pelaksanaan, partisipasi dalam pemanfaatan hasil, dan partisipasi dalam evaluasi. Keempat dimensi tersebut digunakan untuk melihat sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan (Home & Rump, 2020).

Dimensi pertama yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan. Partisipasi dalam pengambilan keputusan merupakan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan penentuan kebijakan pembangunan (Cohen & Uphoff). Pada tahap ini masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi, usulan, pendapat, maupun kebutuhan yang dianggap penting dalam pembangunan. Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan biasanya dilakukan melalui musyawarah, forum pertemuan masyarakat, maupun diskusi bersama pemerintah desa dan lembaga terkait (Larisu & Jopang, 2022). Partisipasi pada tahap ini sangat penting karena keputusan pembangunan yang dihasilkan akan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat apabila masyarakat dilibatkan secara langsung dalam proses perumusannya (Luxton et al., 2026).

Dimensi kedua yaitu partisipasi dalam pelaksanaan. Partisipasi dalam pelaksanaan merupakan keterlibatan masyarakat dalam menjalankan program pembangunan yang telah direncanakan Cohen & Uphoff. Bentuk partisipasi pada tahap ini dapat berupa

tenaga, pikiran, waktu, material, maupun kerja sama dalam kegiatan pembangunan. Partisipasi dalam pelaksanaan menunjukkan adanya rasa tanggung jawab masyarakat terhadap pembangunan di lingkungan mereka (Apriyani & Arif, 2020). Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan juga dapat memperkuat nilai gotong royong dan solidaritas sosial dalam masyarakat (Sembel et al., 2017).

Dimensi ketiga yaitu partisipasi dalam pemanfaatan hasil. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil merupakan keterlibatan masyarakat dalam menikmati dan memanfaatkan hasil pembangunan yang telah dilaksanakan Cohen & Uphoff. Pembangunan yang berhasil harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, baik dalam meningkatkan kesejahteraan, mempermudah aktivitas masyarakat, maupun meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara umum (Juliana & Priyanti, 2023). Partisipasi dalam pemanfaatan hasil menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya terlibat dalam proses pembangunan, tetapi juga merasakan dampak positif dari pembangunan tersebut (Sante et al., 2023).

Dimensi keempat yaitu partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi dalam evaluasi merupakan keterlibatan masyarakat dalam memberikan penilaian, pengawasan, maupun

tanggapan terhadap hasil pembangunan yang telah dilakukan Cohen & Uphoff. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah pembangunan telah berjalan sesuai tujuan dan kebutuhan masyarakat (Munawaroh & Khotimah, 2025). Keterlibatan masyarakat dalam evaluasi penting dilakukan agar masyarakat dapat menyampaikan kritik, saran, maupun masukan terhadap kekurangan pembangunan sehingga dapat menjadi bahan perbaikan dalam pembangunan berikutnya (Hakim, 2017).

Selain teori partisipasi masyarakat, penelitian ini juga menggunakan konsep forum adat sebagai salah satu sarana partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Forum adat merupakan lembaga sosial yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat berdasarkan nilai-nilai adat dan budaya setempat (Soetomo, 2022). Forum adat berfungsi sebagai wadah musyawarah masyarakat, penyelesaian masalah sosial, serta media penyampaian aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa (Larisu & Jopang, 2022). Dalam masyarakat pedesaan, forum adat memiliki peran penting dalam menjaga hubungan sosial, memperkuat nilai gotong royong, serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat dan pembangunan desa (Rai et al., 2024).

Keberadaan forum adat dalam pembangunan desa dapat menjadi sarana komunikasi antara masyarakat

dan pemerintah desa (Hakim, 2017). Forum adat membantu masyarakat dalam menyampaikan kebutuhan, keluhan, maupun usulan pembangunan secara musyawarah. Selain itu, forum adat juga dapat memperkuat hubungan kerja sama antara pemerintah desa dan masyarakat dalam menentukan prioritas pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat (Larisu & Jopang, 2022). Dengan adanya forum adat, proses pembangunan desa diharapkan dapat berjalan lebih partisipatif, demokratis, dan sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat (Rai et al., 2024).

Forum adat merupakan lembaga sosial yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat serta memiliki fungsi dalam menjaga nilai-nilai budaya, menyelesaikan masalah sosial, dan menjadi wadah musyawarah masyarakat (Soetomo, 2022). Dalam konteks pembangunan desa, forum adat memiliki peran strategis sebagai media penyampaian aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa. Forum adat juga berfungsi memperkuat nilai gotong royong, solidaritas sosial, dan kebersamaan masyarakat dalam mendukung pembangunan desa (Hakim, 2017). Melalui forum adat, masyarakat dapat ikut menentukan kebutuhan prioritas pembangunan yang dianggap penting bagi kehidupan mereka sehari-hari (Rai, Claridge, Lozano, & Greening, 2024)

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif (Sugiyono, 2018). Metode deskriptif kualitatif digunakan untuk memahami dan menggambarkan secara mendalam mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui forum adat berdasarkan perspektif masyarakat Dusun 5 Desa Bale Kecamatan Tanantovea Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada fenomena sosial, pengalaman, serta pandangan masyarakat terkait keterlibatan mereka dalam proses pembangunan desa (Sugiyono, 2018).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan informan yang dianggap mengetahui dan memahami permasalahan penelitian. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui dokumen, jurnal, buku, peraturan perundang-undangan, serta berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dan pembangunan desa.

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling (Sugiyono, 2018). Teknik purposive sampling merupakan teknik penentuan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan kebutuhan

penelitian. Informan dipilih karena dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam proses pembangunan desa melalui forum adat. Adapun informan dalam penelitian ini meliputi masyarakat Dusun 5 Desa Bale, tokoh adat, kepala dusun, pemerintah desa, serta pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pembangunan desa.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (dalam Sugiyono, 2018). Reduksi data dilakukan dengan memilih dan menyederhanakan data yang diperoleh dari lapangan sesuai fokus penelitian. Untuk menguji keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber (Sugiyono, 2018). Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara dari beberapa informan yang berbeda untuk memperoleh data yang valid dan sesuai dengan kondisi di lapangan.

PEMBAHASAN

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Bale menunjukkan adanya keterlibatan warga pada berbagai tahapan pembangunan desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber, masyarakat Dusun 5 secara umum telah dilibatkan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan,

hingga evaluasi pembangunan. Keterlibatan tersebut dapat dianalisis menggunakan teori dimensi partisipasi dari Cohen dan Uphoff yang membagi partisipasi masyarakat ke dalam empat dimensi utama, yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi pembangunan.

1. Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan

Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat Desa Bale diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan mereka melalui musyawarah desa yang dilaksanakan di Baruga. Forum musyawarah tersebut menjadi wadah utama masyarakat dalam menyampaikan usulan pembangunan seperti perbaikan jalan, pembangunan jembatan, hingga usulan penyediaan alat pengupas kemiri. Informasi mengenai pelaksanaan musyawarah biasanya diumumkan melalui masjid maupun Kepala Dusun.

Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat telah terlibat dalam dimensi partisipasi pengambilan keputusan sebagaimana dikemukakan oleh Cohen dan Uphoff. Masyarakat tidak hanya hadir sebagai penerima kebijakan, tetapi juga diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan kebutuhan mereka. Hal ini terlihat dari pernyataan narasumber yang menyebutkan bahwa masyarakat dapat mengusulkan pembangunan tanggul

penahan longsor akibat banjir yang sering merusak jalan desa.

Namun demikian, partisipasi masyarakat dalam musyawarah belum sepenuhnya optimal. Beberapa narasumber menyampaikan bahwa tidak semua warga hadir dalam rapat karena kesibukan pribadi sehingga kehadiran masyarakat masih bersifat sebagian. Dalam praktiknya, sebagian warga menyerahkan aspirasi kepada Kepala Dusun atau tokoh masyarakat untuk disampaikan dalam forum desa. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat masih dipengaruhi oleh kesadaran dan keterlibatan aktif masing-masing individu.

Selain itu, hasil wawancara dengan aparat desa menunjukkan bahwa pengambilan keputusan pembangunan juga dipengaruhi oleh regulasi dan keterbatasan anggaran desa. Pemerintah desa menyampaikan bahwa program pembangunan tidak sepenuhnya dapat memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat karena adanya aturan penggunaan dana desa yang telah ditentukan dari pemerintah pusat. Dengan demikian, aspirasi masyarakat tetap dipertimbangkan berdasarkan tingkat urgensi dan asas manfaatnya.

2. Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan

Partisipasi masyarakat Desa Bale dalam pelaksanaan pembangunan terlihat melalui budaya gotong royong

yang masih kuat dipertahankan oleh masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat secara sukarela ikut terlibat dalam pembangunan jalan, jembatan, dan perbaikan akses menuju kebun. Pelaksanaan pembangunan tidak hanya melibatkan aparat desa, tetapi juga masyarakat, tokoh adat, Kepala Dusun, hingga pihak luar seperti Brimob dan aparat keamanan.

Keterlibatan masyarakat secara langsung dalam pelaksanaan pembangunan mencerminkan dimensi partisipasi pelaksanaan menurut Cohen dan Uphoff. Masyarakat tidak hanya memberikan dukungan berupa tenaga, tetapi juga menunjukkan rasa tanggung jawab terhadap pembangunan desa. Gotong royong dilakukan tanpa adanya imbalan khusus karena masyarakat menyadari bahwa pembangunan tersebut ditujukan untuk kepentingan bersama.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan juga terlihat pada sektor perkebunan kemiri yang menjadi potensi utama Desa Bale. Mayoritas masyarakat bekerja sebagai petani kemiri dan saling bekerja sama dalam pengelolaan hasil perkebunan. Pemerintah desa turut memberikan dukungan berupa pembagian bibit kemiri, kopi, dan cengkeh kepada masyarakat. Selain itu, pemerintah desa juga membantu memfasilitasi akses pemasaran hasil perkebunan melalui pengepul lokal.

Meskipun demikian, hasil wawancara menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan pembangunan, khususnya pada pengelolaan hasil kemiri. Masyarakat telah lama mengusulkan alat pengupas kemiri untuk meningkatkan nilai jual hasil panen, tetapi hingga saat ini usulan tersebut belum terealisasi. Akibatnya, masyarakat masih menjual kemiri dalam bentuk mentah atau bercangkang sehingga nilai ekonominya belum maksimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam menyampaikan kebutuhan sudah cukup baik, tetapi belum seluruhnya diimbangi dengan realisasi program pembangunan dari pemerintah desa.

3. Partisipasi dalam Pemanfaatan Hasil Pembangunan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Bale telah merasakan manfaat dari pembangunan yang dilakukan pemerintah desa, terutama pembangunan jalan dan jembatan yang mempermudah aktivitas masyarakat. Perbaikan infrastruktur membantu masyarakat dalam mengakses kebun, mengangkut hasil pertanian, dan memperlancar mobilitas warga antarwilayah desa.

Dalam teori Cohen dan Uphoff, pemanfaatan hasil pembangunan menjadi salah satu indikator penting keberhasilan partisipasi masyarakat. Pembangunan dikatakan berhasil

apabila hasilnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Berdasarkan wawancara, sebagian masyarakat menyatakan bahwa pembangunan yang dilakukan sudah memberikan dampak positif, terutama dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat sebagai petani kemiri.

Namun, pemanfaatan hasil pembangunan belum dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. Beberapa narasumber menyampaikan bahwa kondisi jalan di beberapa wilayah masih rusak dan akses menuju perkebunan masih terbatas. Selain itu, belum tersedianya alat pengolahan kemiri juga menyebabkan masyarakat belum memperoleh manfaat ekonomi yang optimal dari potensi perkebunan yang dimiliki desa.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan di Desa Bale masih menghadapi tantangan dalam pemerataan manfaat pembangunan. Faktor keterbatasan anggaran desa dan kondisi geografis wilayah menjadi salah satu penyebab belum maksimalnya pemerataan hasil pembangunan kepada seluruh masyarakat.

4. Partisipasi Masyarakat dalam Evaluasi Pembangunan

Partisipasi masyarakat dalam evaluasi pembangunan terlihat melalui keterlibatan warga dalam memberikan tanggapan terhadap hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Pemerintah desa bersama aparat terkait biasanya

melakukan evaluasi setelah pembangunan selesai ataupun ketika muncul kerusakan pada fasilitas desa.

Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat mengenai kondisi pembangunan, seperti keamanan jalan dan manfaat jembatan yang telah dibangun. Evaluasi dilakukan melalui musyawarah desa maupun diskusi bersama masyarakat. Pemerintah desa juga menerima laporan dari Kepala Dusun dan masyarakat apabila terdapat permasalahan yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.

Dalam perspektif teori Cohen dan Uphoff, keterlibatan masyarakat dalam evaluasi menunjukkan bahwa masyarakat memiliki posisi penting dalam proses pembangunan desa. Partisipasi evaluatif memungkinkan masyarakat untuk memberikan kritik, saran, dan penilaian terhadap keberhasilan program pembangunan.

Akan tetapi, partisipasi masyarakat dalam evaluasi masih belum sepenuhnya aktif. Beberapa narasumber menyatakan bahwa evaluasi biasanya baru dilakukan ketika muncul kerusakan atau masalah tertentu yang dianggap mendesak. Selain itu, tidak semua masyarakat hadir dalam forum evaluasi sehingga proses evaluasi lebih banyak diikuti oleh aparat desa dan sebagian masyarakat yang aktif dalam kegiatan desa

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Bale, dapat disimpulkan bahwa keterlibatan masyarakat telah berlangsung pada berbagai tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, hingga evaluasi pembangunan. Partisipasi tersebut terlihat melalui keikutsertaan masyarakat dalam musyawarah desa, kegiatan gotong royong pembangunan jalan dan jembatan, serta keterlibatan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan memberikan tanggapan terhadap hasil pembangunan yang telah dilakukan.

Berdasarkan teori dimensi partisipasi dari Cohen dan Uphoff, masyarakat Desa Bale telah menunjukkan bentuk partisipasi yang cukup baik. Pada tahap pengambilan keputusan, masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan usulan pembangunan melalui forum musyawarah di Baruga maupun melalui Kepala Dusun dan tokoh adat. Pada tahap pelaksanaan, masyarakat secara sukarela terlibat dalam kegiatan gotong royong sebagai bentuk tanggung jawab bersama terhadap pembangunan desa. Selain itu, masyarakat juga telah merasakan manfaat pembangunan, khususnya pada pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang mendukung aktivitas masyarakat dan

sektor perkebunan kemiri sebagai potensi utama desa.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan beberapa hambatan dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat. Tidak semua masyarakat aktif menghadiri musyawarah desa karena faktor kesibukan pribadi, sehingga partisipasi warga belum sepenuhnya merata. Selain itu, keterbatasan anggaran desa menyebabkan beberapa kebutuhan masyarakat, seperti penyediaan alat pengupas kemiri dan pemerataan pembangunan infrastruktur, belum dapat terealisasi secara optimal. Evaluasi pembangunan juga cenderung dilakukan ketika muncul masalah atau kerusakan tertentu sehingga keterlibatan masyarakat dalam proses evaluasi masih perlu ditingkatkan.

Secara keseluruhan, partisipasi masyarakat di Desa Balai menunjukkan adanya hubungan kerja sama yang cukup baik antara pemerintah desa dan masyarakat dalam mendukung pembangunan desa. Keterlibatan masyarakat yang aktif serta budaya gotong royong yang masih kuat menjadi faktor penting dalam mendorong keberhasilan pembangunan desa yang lebih partisipatif dan berkelanjutan

DAFTAR PUSTAKA

Apriyani, L., & Arif, D. B. (2020). Partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa di Desa

Toyareka Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah. *Jurnal Citizenship: Media Publikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*.

Azkie, N., Raudah, S., Noorrahman, M. F., Publik, A., Tinggi, S., & Amuntai, I. A. (2026). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA GUHA KECAMATAN BATUMANDI KABUPATEN BALANGAN. *Al Iidara Balad*, 7(2), 906–917.
<https://doi.org/10.36658/ALIIDARABALAD.7.2.1749>

Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik desa dan pembangunan wilayah pedesaan*.

Drew, C., & Adisasmita, A. C. (2021). Gejala dan komorbid yang memengaruhi mortalitas pasien positif COVID-19 di Jakarta Timur, Maret-September 2020. *Tarumanagara Medical Journal*, 3(1), 42–51.
<https://doi.org/10.24912/TMJ.V3I2.11742>

Hakim, L. (2017). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Sukamerta Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 2(2), 43.

Home, R., & Rump, N. (2020). Bridging the literature gap: A framework for assessing actor participation in

Receive : 06 May 2026

Revised : 18 May 2026

Accepted : 08 June 2026

P-ISSN : 1858-084X

E-ISSN : 2808-5213

DOI : 10.55100/administrator.v8i1.119

- participatory guarantee systems. *Sustainability*, 12(19).
- Juliana, D. A., & Priyanti, E. (2023). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Ciledug, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(3), 8089–8096.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2014). Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2015). Peraturan Menteri Desa PDTT No. 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2020). Prioritas penggunaan Dana Desa.
- Larisu, Z., & Jopang. (2022). Partisipasi masyarakat dalam mendukung optimalisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan desa di Kabupaten Muna. *Sebatik*, 26(2).
- Luxton, D., Thorpe, N., Crane, E., Warne, M., Cornwall, O., El-Dalil, D., ... Rajkumar, A. P. (2026). Systematic review of the efficacy of pharmacological and non-pharmacological interventions for improving quality of life of people with dementia. *The British Journal of Psychiatry*, 228(1), 55–67. <https://doi.org/10.1192/BJP.2025.11>
- Munawaroh, M., & Khotimah, K. (2025). Pengaruh partisipasi masyarakat terhadap keberhasilan pembangunan desa di Desa Sumber Ketempa Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember. *FORMULA Jurnal Administrasi Publik*, 2(2).
- Pengaruh Disiplin Kerja, Lingkungan Kerja Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Melalui Keterikatan Kerja Pt. Jasa Marga Surabaya Mojokerto | Soetomo Business Review. (n.d.). Retrieved June 6, 2026, from <https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/sbr/article/view/5380>
- Petersen, K. K., Milà-Alomà, M., Li, Y., Du, L., Xiong, C., Tosun, D., ... Schindler, S. E. (2026). Predicting onset of symptomatic Alzheimer's disease with plasma p-tau217 clocks. *Nature Medicine* 2026 32:3, 32(3), 1085–1094. <https://doi.org/10.1038/s41591-026-04206-y>
- Rai, A., Claridge, B., Lozano, J., & Greening, D. W. (2024). The discovery of extracellular vesicles and their emergence as a next-generation therapy. *Circulation Research*, 135(1), 198–221.

Receive : 06 May 2026

Revised : 18 May 2026

Accepted : 08 June 2026

P-ISSN : 1858-084X

E-ISSN : 2808-5213

DOI : 10.55100/administrator.v8i1.119

[https://doi.org/10.1161/CIRCRESA
HA.123.323054;REQUESTEDJOUR
NAL:JOURNAL:RES;CTYPE:STRI
NG:JOURNAL](https://doi.org/10.1161/CIRCRESA
HA.123.323054;REQUESTEDJOUR
NAL:JOURNAL:RES;CTYPE:STRI
NG:JOURNAL)

- Sante, E., Masinambow, V. A. J., & Sumual, J. I. (2023). Analisis partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa (Studi: Desa Tabulo Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 23(1).
- Sembel, T., Gosal, R., & Pangemanan, S. (2017). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa (Studi di Desa Sinsingon Barat Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow). *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suyono, S., Aunullah, I., & Sa'diyah, H. (2026). Implementasi model pemberdayaan masyarakat berbasis edukasi partisipatif dalam penguatan kapasitas sosial dan ekonomi lokal. *Penamas: Journal of Community Service*, 6(1), 121–130. <https://doi.org/10.53088/PENAMA.S.V6I1.2827>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.